



Indikator **SOSIAL EKONOMI** KABUPATEN SAROLANGUN **2019**

Kata Pengantar

Buku Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 adalah kelanjutan dari buku sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun. Indikator Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini ditujukan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Buku ini menyajikan tinjauan kinerja perekonomian Kabupaten Sarolangun secara deskriptif dan diharapkan dapat menambah informasi yang berkaitan dengan situasi umum sosial perekonomian Kabupaten Sarolangun.

Dalam Penyusunan Buku Indikator Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini telah diupayakan untuk menyajikan berbagai indikator sosial ekonomi secara lengkap dan informatif, namun kami yakin masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik guna perbaikan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan instansi lain maupun kalangan swasta serta seluruh konsumen data lainnya.

Sarolangun, November 2019
Kepala Bappeda
Kabupaten Sarolangun

H. LUKMAN, S.Pd., M.Pd.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
VISI DAN MIS	6
SELAYANG PANDANG	9
PEMERINTAHAN	12
KEPENDUDUKAN	17
KETENAGAKERJAAN	23
PERTUMBUHAN EKONOMI	28
KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN	35
PEMBANGUNAN MANUSIA	40





VISI RPJMD 2017 - 2022

**"SAROLANGUN
LEBIH
SEJAHTERA"**



MISI RPJMD 2017 - 2022

- 1** Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
- 2** Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
- 3** Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi local
- 4** Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
- 5** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender
- 6** Meningkatkan pelayanan publik

Selayang Pandang

Kabupaten Sarolangun



Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102^o 03'39" sampai 103^o 13'17" Bujur timur dan antara 01^o 53'39" sampai 02^o 46'24" Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

“

Luas Kabupaten Sarolangun

6.174 KM²

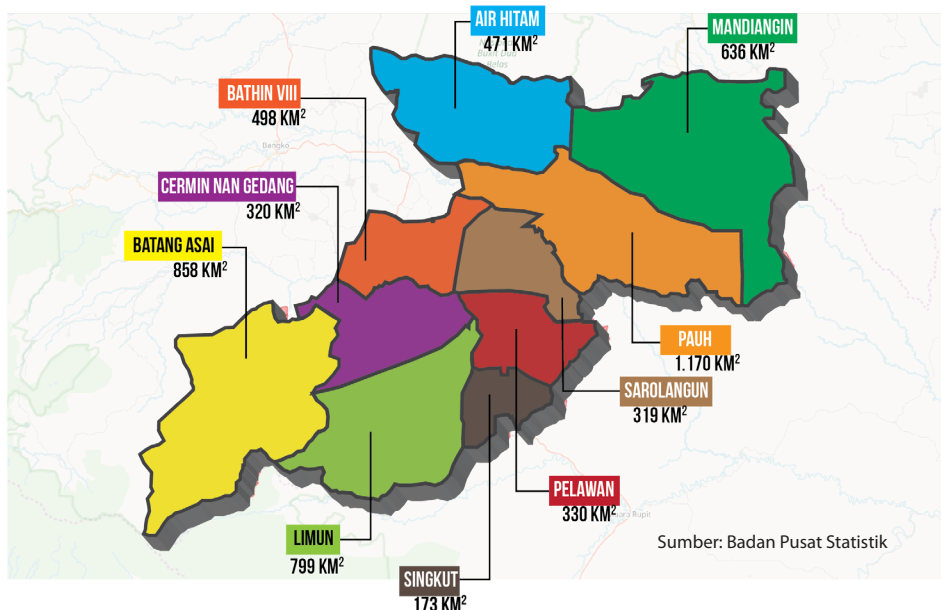
(11,55 % dari wilayah Provinsi Jambi)

”

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan :

1. Batang Asai
2. Limun
3. Cermin Nan Gedang
4. Pelawan
5. Singkut
6. Sarolangun
7. Bathin VIII
8. Pauh
9. Air Hitam
10. Mandiingin

Gambar 1
Peta Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun



Berdasarkan Gambar 1 diatas menunjukkan peta luas wilayah Kabupaten Sarolangun. Dari gambar tersebut wilayah terluas adalah Kecamatan Pauh yaitu seluas 1.170 Km² atau sebesar 28,67 persen dari total luas Kabupaten Sarolangun. Kecamatan terbesar/terluas kedua adalah Kecamatan Batang Asai dengan luas 858 Km² atau sebesar 13,90 persen dari total luas Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya Kecamatan Limun dengan luas 799 Km² atau sekitar 12,94 persen dari total luas Kabupaten

Sarolangun. Setelah Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiingin juga memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 636 Km² atau sekitar 10,30 persen. Berkaitan dengan luas wilayah, di Kabupaten Sarolangun dengan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Singkut dengan luas 173 Km² atau hanya 2,80 persen dari luas Kabupaten Sarolangun. Informasi luas wilayah ini merupakan informasi penting bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan untuk pemerataan daerah.

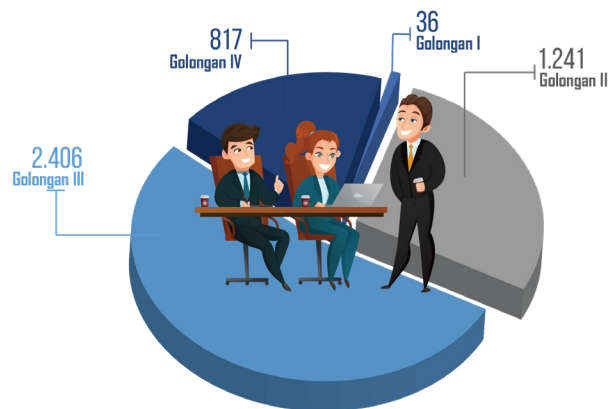
PEMERINTAHAN

Kabupaten Sarolangun



Kabupaten Sarolangun yang beribukotakan di Kecamatan Sarolangun memiliki 149 desa dan 9 kelurahan dari total 10 kecamatan. Pemerintahan Kabupaten Sarolangun didukung dengan SDM dari pegawai negeri sipil sebanyak 4.500 pegawai yang tercatat pada tahun 2018. Jumlah pegawai negeri sipil ini bila dilihat menurut golongan kepangkatan dapat dibedakan menjadi 4 golongan yaitu golongan I hingga IV. Dimana golongan I terdapat sebanyak 36 orang, golongan II sebanyak 1.241 orang, golongan III sebanyak 2.406 orang dan untuk golongan IV sebanyak 817 orang.

Gambar 2
Komposisi PNS Kabupaten Sarolangun menurut Golongan Kepangkatan

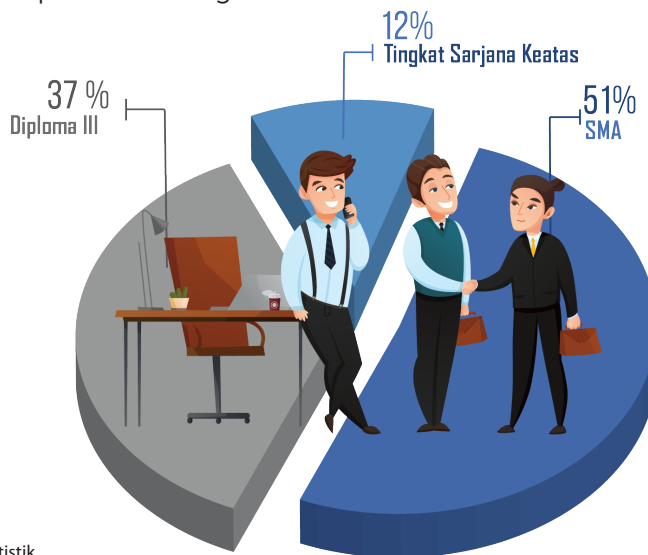


Sumber: Badan Pusat Statistik

“Jumlah PNS di Pemerintah Kabupaten Sarolangun :

4.500
pegawai di Tahun 2018”

Gambar 3
Komposisi PNS Kabupaten Sarolangun Menurut Pendidikan



Sumber: Badan Pusat Statistik

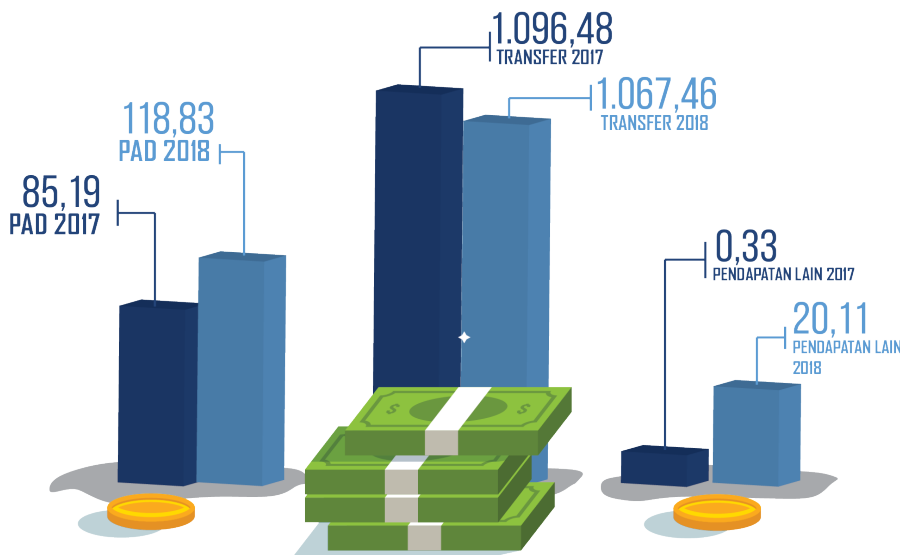
Berdasarkan komposisi pendidikan, sumber daya pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dapat tergambar pada gambar 3. Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun masih di dominasi dengan pegawai yang berpendidikan SMA yaitu sebesar 51 persen atau 690 pegawai. Sedangkan untuk pendidikan diploma III sebanyak 37 persen atau 499 pegawai dan yang berpendidikan sarjana keatas sebanyak 12 persen atau 156 pegawai. Hal ini menja-

di PR pemerintah daerah dalam mengembangkan kekuatan aparatur pemerintah daerahnya sebagai dasar dalam mendukung kegiatan pemerintahan agar lebih optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan SDM dengan berbagai program-program pemerintah daerah seperti beasiswa pendidikan, pelatihan dan diklat serta kursus-kursus pengembangan diri bagi pegawai negeri sipil. Program-program di bidang pengembangan SDM tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang diterapkakn baik ke apratur maupun masyarakat.

Dari segi keuangan daerah di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari jumlah perkembangan pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah. Gambar 4 menunjukkan perkembangan pendapatan daerah di Kabupaten Sarolangun. Pendapatan Daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebesar 39,48 persen dari tahun 2017 ke 2018 yaitu ditunjukkan dengan PAD tahun 2017 sebesar 85,19 miliar rupiah meningkat menjadi 119,83 miliar rupiah. Komponen pendapatan yang meningkat selain PAD adalah pendapatan lainnya dimana mening-

kat signifikan yaitu dari 0,33 miliar rupiah menjadi 20,11 miliar rupiah. Peningkatan dari komponen-komponen pendapatan daerah di Kabupaten Sarolangun ini merupakan bukti peran pemerintah dalam peningkatan pendapatan daerah yang tentunya berdampak positif terhadap perekonomian di daerah. Berbeda dengan PAD dan pendapatan lainnya untuk komponen transfer mengalami penurunan yaitu sebesar 2,64 persen yaitu dari 1.096,48 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 1.067,46 miliar rupiah di 2018.

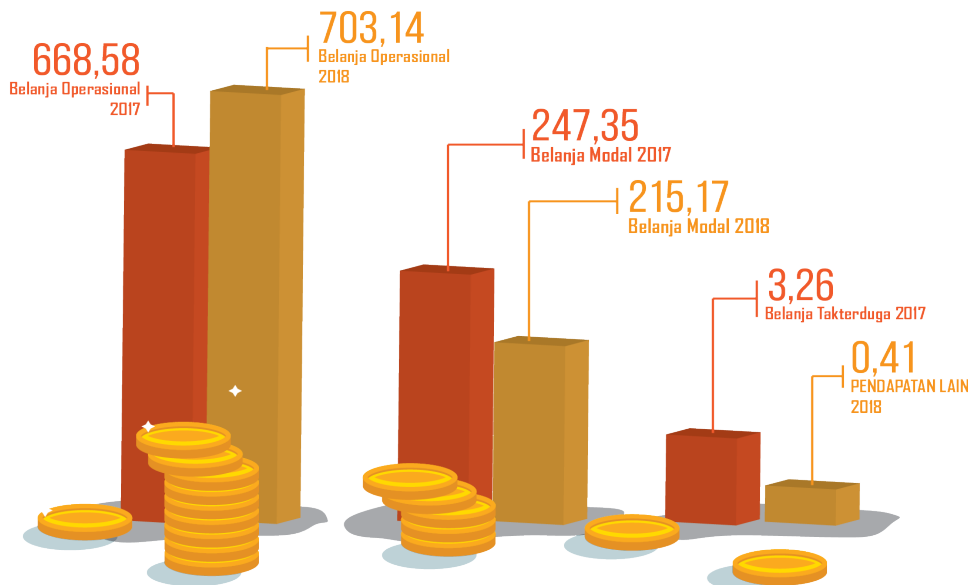
Gambar 4
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun Periode 2017 dan 2018 (Miliar Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 5

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Periode 2017 dan 2018 (Miliar Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tercermin dalam gambar 5 diatas. Belanja operasional Kabupaten Sarolangun tahun 2017 sebesar 668,58 miliar rupiah meningkat menjadi 703,14 miliar rupiah di tahun 2018. Untuk di belanja modal sendiri di periode tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan nilai belanja modal dimana tahun 2017 tercatat besar belanja modal pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar 247 miliar rupiah yang menurun menjadi 215,15 miliar

rupiah di tahun 2018. Terkait dengan belanja tak terduga sendiri di periode tahun 2017 dan 2018 juga terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu tercatat di tahun 2017 belanja tak terduga Kabupaten Sarolangun sebesar 3,26 miliar rupiah menurun menjadi 0,41 miliar rupiah di tahun 2018. Komponen-komponen dalam kegiatan belanja daerah tentunya secara umum terjadi penurunan di tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana dari 919,19 miliar rupiah menjadi 918,72 miliar rupiah.

KEPENDUDUKAN

Kabupaten Sarolangun



Penduduk merupakan salah satu aset penting dan berharga dalam menggerakkan perekonomian daerah, karena penduduk merupakan aktor dari perekonomian daerah tersebut. Penduduk juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah karena merupakan cerminan dampak langsung dari berbagai kebijakan pembangunan daerah dengan berbagai permasalahan yang timbul dari pembangunan seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang tentu tertuju pada penduduk itu sendiri. Tahun

“

Penduduk Kabupaten Sarolangun tercatat di tahun 2018 sebanyak :

295.985 Jiwa,

Dengan kepadatan penduduk :

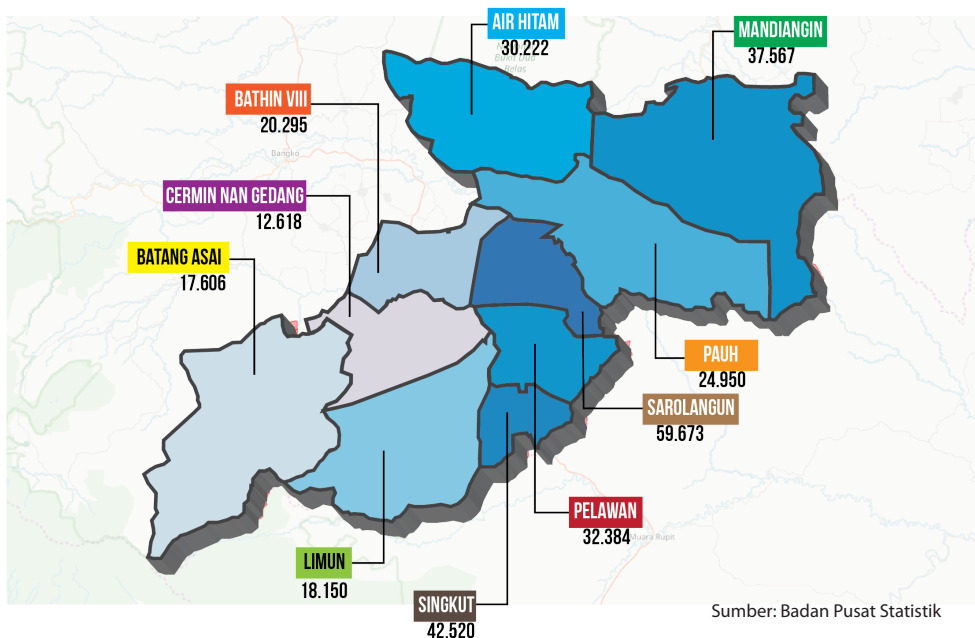
48 Jiwa per 1 Km².

”

2018 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 295.985 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari total penduduk tersebut, terdapat 150.732 jiwa penduduk laki-laki dan 145.253 penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sarolangun yaitu 47,94 jiwa/km² yang artinya terdapat 48 jiwa di setiap 1 km² yang mendiami wilayah tersebut. Dari komposisi seks ra-

Gambar 6

Peta Penyebaran penduduk di Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan (jiwa) Tahun 2018



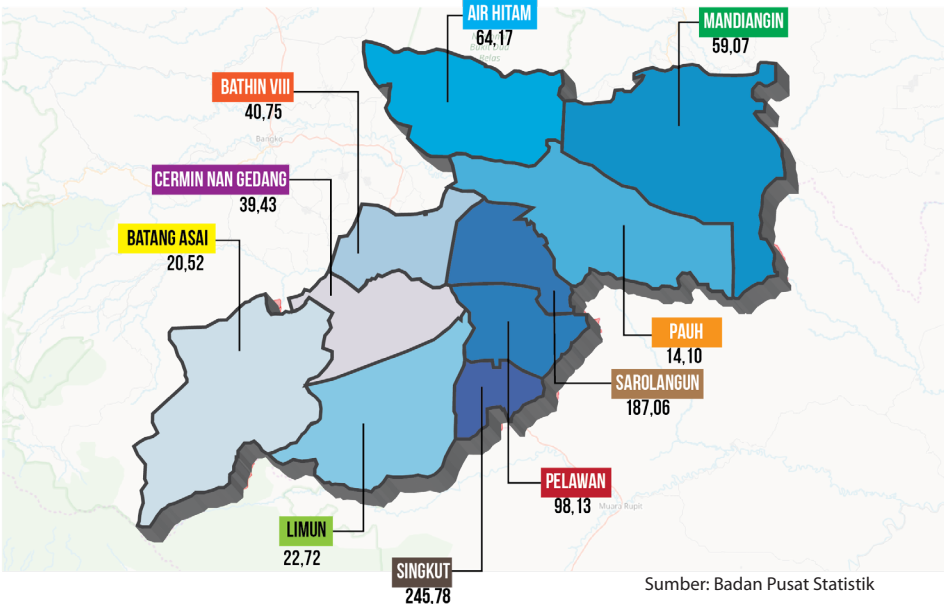
sio juga tercatat ditahun 2018 sebesar 103,77 yang artinya setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Sarolangun tergambaran pada gambar 6. Bila dilihat menurut sebaran kecamatan, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sarolangun dengan jumlah penduduk sebanyak 59.673 jiwa atau sekitar 20,16 persen dari total penduduk Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya penduduk

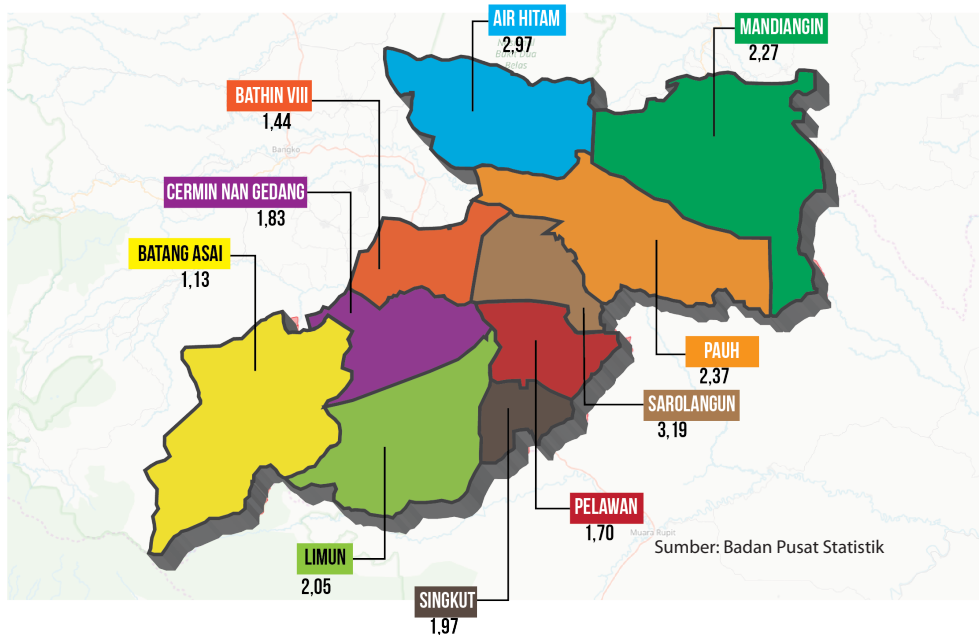
terbanyak di kecamatan Singkut yaitu sebanyak 42.520 jiwa atau sekitar 14,37 persen dari total penduduk Kabupaten Sarolangun. Penduduk terbesar ketiga di kecamatan Pelawan yaitu sebanyak 32.384 jiwa atau 10,94 persen dari total penduduk Kabupaten Sarolangun. Kecamatan yang penduduknya paling sedikit berada di kecamatan Cermin Nan Gedang dengan jumlah penduduk sebanyak 12.618 jiwa atau hanya 4,26 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Sarolangun.

Berbicara terkait penduduk yang perlu menjadi perhatian yaitu luas wilayah yang ditempati oleh penduduk tersebut atau dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Tidak sejalan dengan jumlah penduduk perkecamatan dan karena perbedaan luas wilayah perkecamatan maka berdasarkan dari gambar 7 dapat dilihat bahwa penduduk terpadat di Kabupaten Sarolangun terdapat di Kecamatan Singkut yaitu sebanyak 245,78 jiwa/km². Kecamatan terpadat ketiga berada di kecamatan Pelawan yaitu sebanyak 98,13 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang tidak padat bukan berada pada kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil namun di kecamatan berbeda yaitu di kecamatan Pauh yaitu sebanyak 14,10 jiwa/km². Tentunya berdasarkan data tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk pemerataan jumlah penduduk melalui pemerataan pembangunan.

Gambar 7
Peta Kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan (jiwa/km²) Tahun 2018



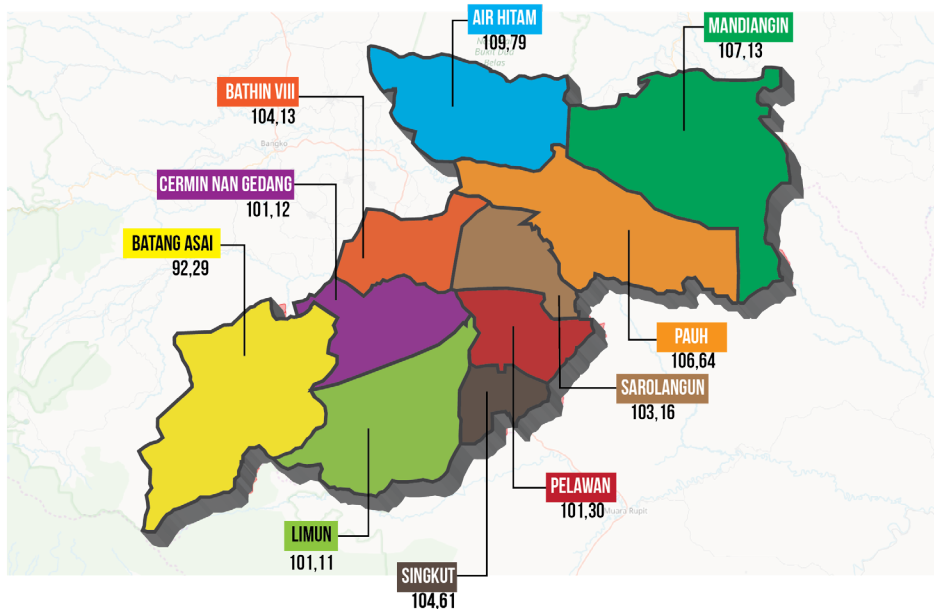
Gambar 8
Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan (%) Tahun 2010 - 2018.



Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu hal yang penting dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga meledaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena bila diabaikan menjadi hal yang tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, lapangan usaha dan lainnya. Bila hal tersebut di abaikan bisa menimbulkan permasalahan ekonomi seperti timbulnya kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan gambar 8 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sarolangun belum merata. Laju pertumbuhan tertinggi berada di kecamatan Sarolangun yang mencapai 3,19

Gambar 9

Peta Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sarolangun Menurut Kecamatan Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

persen. Laju pertumbuhan tertinggi berikutnya ada di kecamatan Air Hitam yang mencapai 2,97 persen. Dan untuk laju pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga berada di kecamatan Pauh yang mencapai 2,37 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk terendah atau lambat berada pada kecamatan Batang Asai yaitu sebesar 1,13 persen, dan selanjutnya berada di kecamatan Cermin Nan Gedang yang laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,44 persen.

“

Kecamatan dengan Seks Rasio terendah berada dikecamatan Batang Asai yaitu sebesar :

92,29 Jiwa per 1 Km².

”

KETENAGAKERJAAN

Kabupaten Sarolangun



Pengangguran merupakan salah satu masalah klasik dari suatu perekonomian daerah. Berbagai program-program pemerintah daerah di glontorkan salah satunya untuk menekan angka pengangguran. Dengan mengetahui kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah, seperti banyaknya angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kualitas yang di ukur dengan pendidikan tenaga kerja dan situasi ketenagakerjaan lainnya, dapat menjadi dsar pengambilan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, data dan informasi

“

Angka Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebesar

4,24%

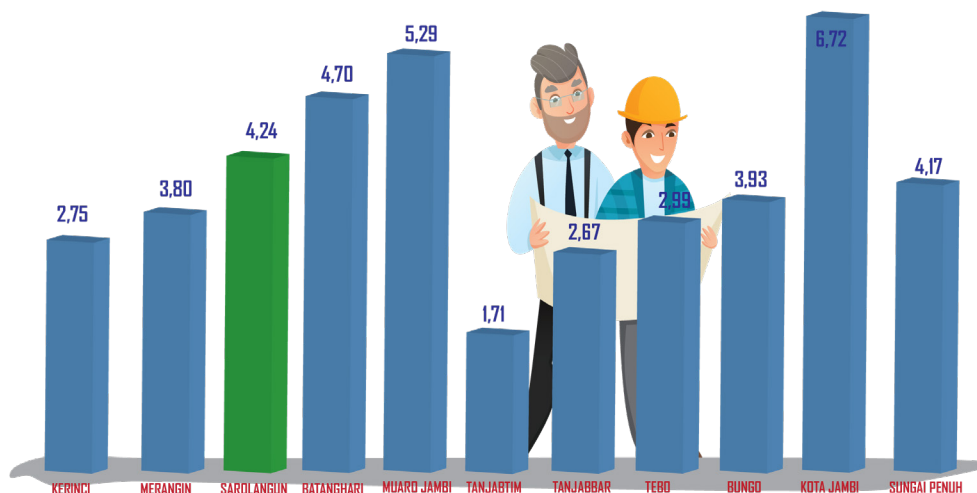
”

ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan ketenagakerjaan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) danTingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2019 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka tingkat pengangguran terbuka kabupaten Sarolangun sebesar 4,24 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di 2018 yang sebesar 4,18 persen.

Gambar 10

Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun di Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 10 diatas yang menggambarkan angka pengangguran terbuka (TPT) yang disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dari sebelas kabupaten/kota angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun masih dalam range yang tinggi yaitu masuk dalam 5 besar pengangguran tertinggi di kabupaten kota. Gambar diatas menunjukkan bahwa TPT terendah di tahun 2019 berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 1,71 persen dan TPT tertinggi terdapat

di Kota Jambi sebesar 6,72 persen. Kabupaten Sarolangun sendiri yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24 persen harus membuat strategi khusus untuk menekan angka pengangguran ini.

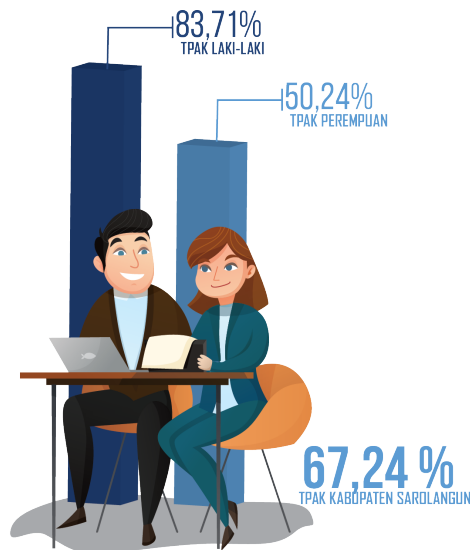
Berbagai kebijakan dan program-program pemerintah diperlukan untuk menekan angka pengangguran ini. Terutama program-program yang bersifat padat karya dalam membantu membuka lapangan usaha seluas-luasnya sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja. Selain dari kebutuhan lapangan

usaha yang tinggi tetapi harus didukung juga dengan sumber daya manusia yang handal agar bisa diterima di dunia kerja. Hal ini berarti pembekalan sumber daya manusia baik dalam bentuk pelatihan siap kerja, diklat-diklat dan pembekalan kompetensi yang handal. Bila dilihat dari jumlah angkatan kerja di kabupaten Sarolangun tercatat sebanyak 141.403 jiwa dimana yang terdiri dari yang bekerja sebanyak 135.498 jiwa dan pengangguran terbuka sebesar 5.905 jiwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebanyak 95,82 persen penduduk kabupaten Sarolangun yang dalam kategori angkatan kerja yang bekerja dan sebanyak 4,18 persen masuk dalam pengangguran terbuka.

Bila dilihat dari kondisi gender dapat dijabarkan bahwa jumlah angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki 89.361 jiwa dan perempuan 53.836 jiwa yang berarti jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak dari jumlah angkatan kerja perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk bekerja di kabupaten sarolangun berdasarkan gender terdiri dari penduduk bekerja laki-laki sebanyak 87.490 jiwa dan 52.480 jiwa yang untuk perempuan. Di penduduk bekerja

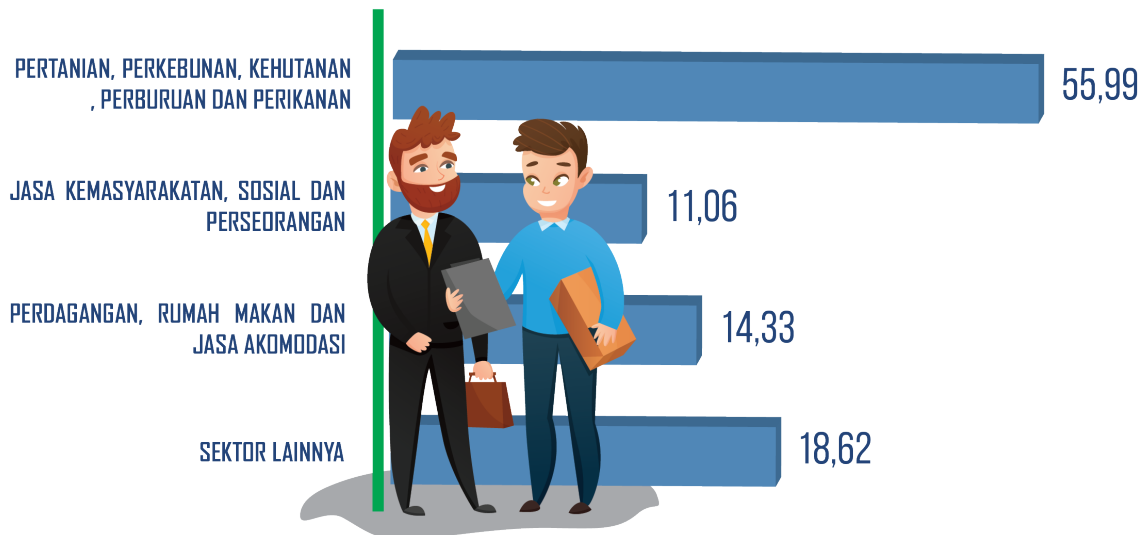
juga masih di dominasi oleh gender laki-laki. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Sarolangun tercatat seanyak 67,24 persen dimana bila dibedakan menurut gender tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan sesuai dengan gambar 11. TPAK untuk laki-laki sebesar 83,71 persen lebih tinggi dari TPAK perempuan yang sebesar 50,24 persen. Penguatan SDM untuk perempuan siap bisa menjadi prioritas dengan maksud meningkatkan angka tersebut.

Gambar 11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2018



Gambar 12

Persentase Pekerjaan Angkatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 di Kabupaten Sarolangun



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 12 menunjukkan gambaran angkatan kerja di Kabupaten Sarolangun menurut lapangan usaha pekerjaan. Dari gambar 12 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kabupaten Sarolangun bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutan dan perikanan yang sebesar 55,99 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian kabupaten Sarolangun yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya angkatan kerja yang di

sektor jasa masyarakat, sosial dan perseorangan sebesar 11,06 persen. Untuk yang angkatan kerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 14,33 persen dan sektor lainnya tercatat sebesar 18,62 persen. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lapangan usaha dengan memperhatikan potensi angkatan kerja yang ada di daerah.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kabupaten Sarolangun



“

**Angka Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sarolangun Tahun
2018 Sebesar:**

4,72%

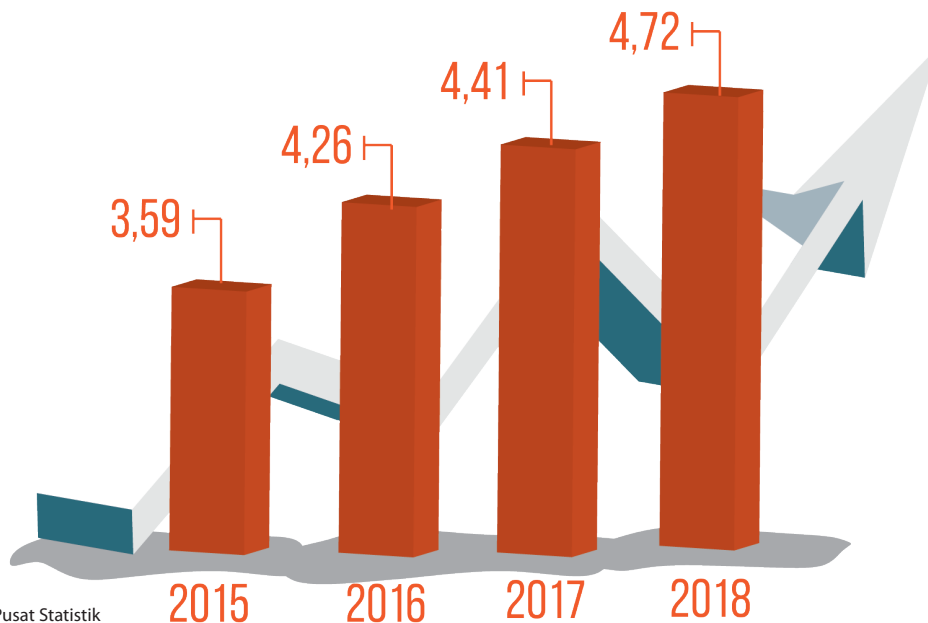
”

Sarolangun sebagai salah satu daerah otonom di provinsi Jambi berupaya menyesuaikan pola pembangunan ekonomi seiring dengan pola kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Kinerja perekonomian pun terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perbaikan dari perekonomian

di kabupaten sarolangun dan kebijakan-kebijakan serta program-program pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi diambil dari laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan perubahan total nilai tambah dari kegiatan perekonomian dari suatu daerah yang terdiri dari berbagai lapangan usaha. Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Gambar 13

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018



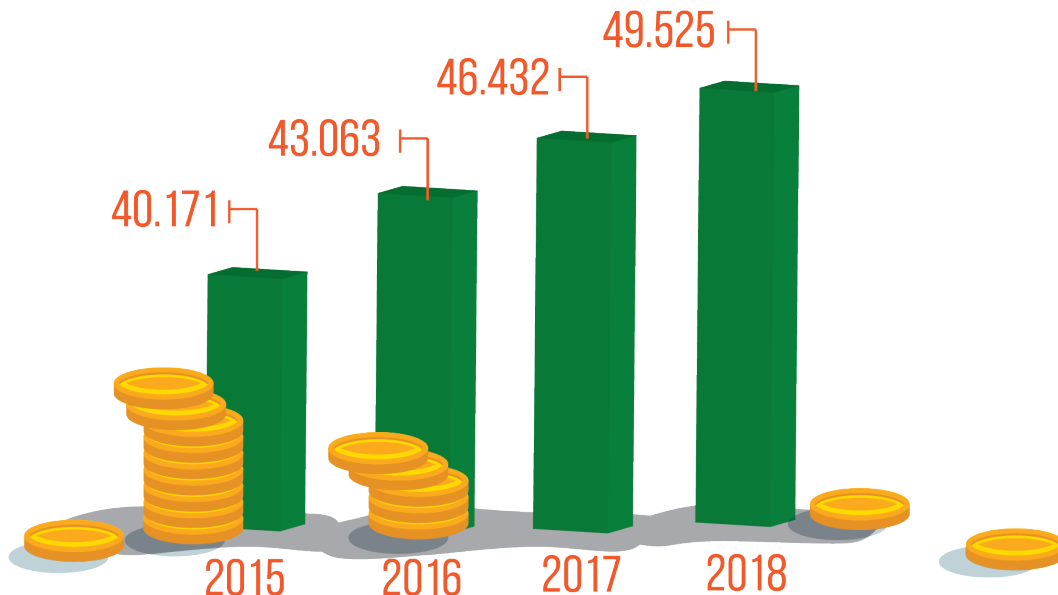
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Gambar 13 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan PDRB atau sering disebut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Berdasarkan gambar di atas menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan dan perbaikan ekonomi dari tahun ke tahun yang di tunjukkan dengan makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 3,59 persen, yang kemu-

dian meningkat menjadi 4,26 persen ditahun 2016. Tidak hanya berhenti ditahun 2016 saja, ditahun 2017 pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 4,41 persen. Selanjutnya di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 4,72 persen. Hal ini berarti pemerintah daerah telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sarolangun.

Gambar 14

Pendapatan Perkapita Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018



Selain indikator pertumbuhan ekonomi, indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produk-

si yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun periode 2015 hingga 2018 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan oleh gambar 14. PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun yang tahun 2015 tercatat 40.171 ribu rupiah meningkat menjadi 49.525 ribu rupiah di tahun 2018.

Gambar 15

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.25	5.30	4.20	2.61
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.04	1.34	4.08	6.31
C	Industri Pengolahan	2.62	3.39	3.66	4.42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.70	9.03	6.51	6.87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.84	4.14	3.34	5.45
F	Konstruksi	6.75	5.00	5.00	4.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.06	5.37	4.63	6.57
H	Transportasi dan Pergudangan	7.51	7.84	5.55	5.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.86	7.34	7.82	6.77
J	Informasi dan Komunikasi	7.11	7.95	5.30	6.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.66	4.77	4.05	0.32
L	Real Estate	3.66	3.29	3.93	4.30
M,N	Jasa Perusahaan	6.77	5.96	5.45	5.90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.51	6.18	3.05	5.81
P	Jasa Pendidikan	4.35	4.26	3.93	4.63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.13	8.84	6.60	6.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.08	6.88	5.70	6.49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.59	4.26	4.41	4.72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		4.5	5.2	4.9	4.7

Sumber: Badan Pusat Statistik

“

6 (enam) lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 :

- 1. Penggalan listrik dan gas (6,87%)**
- 2. Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,77%)**
- 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (6,66%)**
- 4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil (6,57%)**
- 5. Jasa Lainnya (6,49 %)**
- 6. Pertambangan dan Penggalan (6,31%)**

”

Gambar 16 menunjukkan struktur dari perekonomian di Kabupaten Sarolangun yang di gambarkan melalui besarnya distribusi tiap sektor perekonomian dalam pembentukan PDRB di daerah. Bila melihat gambar 16 dapat di lihat bahwa sektor terbesar dalam menyumbangkan nilai tambah di PDRB adalah masih di sektor primer yaitu sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor tersebut menyumbang hingga 27,93 persen. Sektor lainnya yang memberikan dampak yang besar terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah sektor pertambangan dan penggalan yaitu sebesar 21,72 persen.

Sektor berikutnya yang memberikan sumbangsih yang besar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 14,15 persen dan sektor perdangan besar dan eceran; reparasi mobil yang memberikan kontribusi sebesar 8,47 persen. Dari hasil gambaran diatas memberikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk dapat memajukan sektor-sektor tersebut untuk dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sarolangun, tentunya dengan berbagai kebijakan dan program yang ada.

Gambar 16

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.93	29.28	28.95	27.93
B	Pertambangan dan Penggalian	22.18	19.85	21.20	21.72
C	Industri Pengolahan	4.20	4.09	4.01	4.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.03	0.03	0.03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.13	0.13	0.13	0.14
F	Konstruksi	14.68	14.73	14.34	14.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.84	8.28	8.17	8.47
H	Transportasi dan Pergudangan	2.00	1.99	2.01	2.04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.01	2.08	2.14	2.24
J	Informasi dan Komunikasi	3.42	3.71	3.69	3.83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.75	2.77	2.69	2.50
L	Real Estate	1.34	1.36	1.32	1.32
M,N	Jasa Perusahaan	0.25	0.26	0.27	0.27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.81	5.84	5.64	5.81
P	Jasa Pendidikan	2.80	2.83	2.71	2.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.25	1.32	1.30	1.36
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.39	1.43	1.40	1.46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

KEMISKINAN & KETIMPANGAN

Kabupaten Sarolangun



“

**Angka Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Sarolangun Tahun
2019 Sebesar:**

8,45%

”

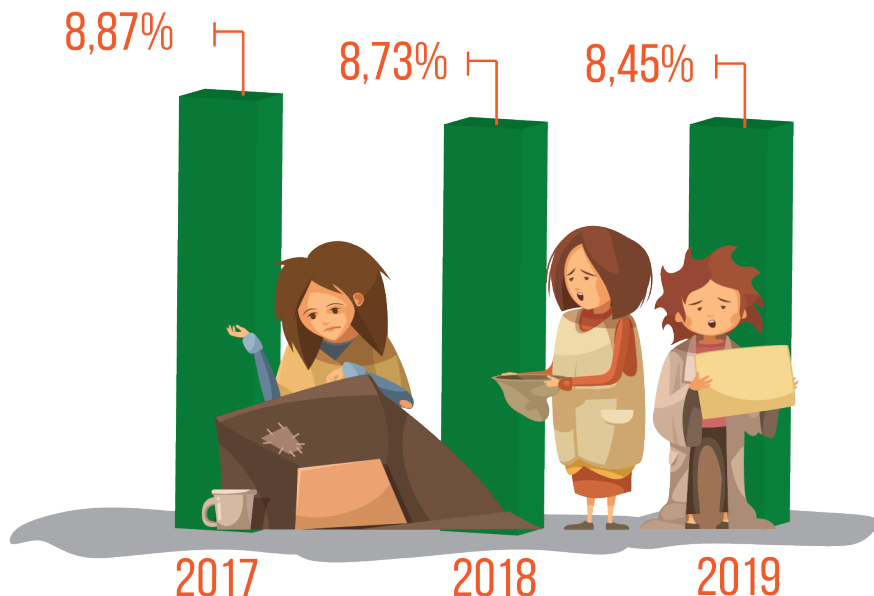
Salah satu indikator penting dan selalu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah adalah terkait masalah kemiskinan. Kemiskinan menurut konsep Badan Pusat Statistik adalah Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dimana Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan se-

banyak 52 jenis komoditi). Sedangkan Kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan).

Gambar 17 menunjukkan perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun periode 2017 hingga 2019 menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 8,87 persen dan menurun ditahun 2018 menjadi 8,73

Gambar 17

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

persen, hal ini menunjukkan program-program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan di kabupaten Sarolangun cukup efektif menurunkan angka kemiskinan di tahun 2017 hingga 2018. Hal ini berlanjut hingga tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun makin menurun hingga sebesar 8,45 persen, walaupun angka kemiskinan ini masih diatas angka kemiskinan provinsi namun program-program pengentasan kemiskinan yang

dilakukan dapat terus dilaksanakan karena telah sukses menurunkan angka kemiskinan. Beberapa evaluasi program atau kebijakan dan percepatan program-program pengentasan untuk dapat lebih cepat menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Sarolangun.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari

kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tahun 2019 tercatat nilai indeks kedalaman kemiskinan kabupaten sarolangun sebesar 1,17 % walaupun bukan terendah dari seluruh kab/kot namun masih cukup baik. Sedangkan untuk nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 sebesar 0,27 % dan masuk dalam beberapa kabupaten/kota yang nilai indeks keparahannya rendah.

“

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebesar :

1,17%

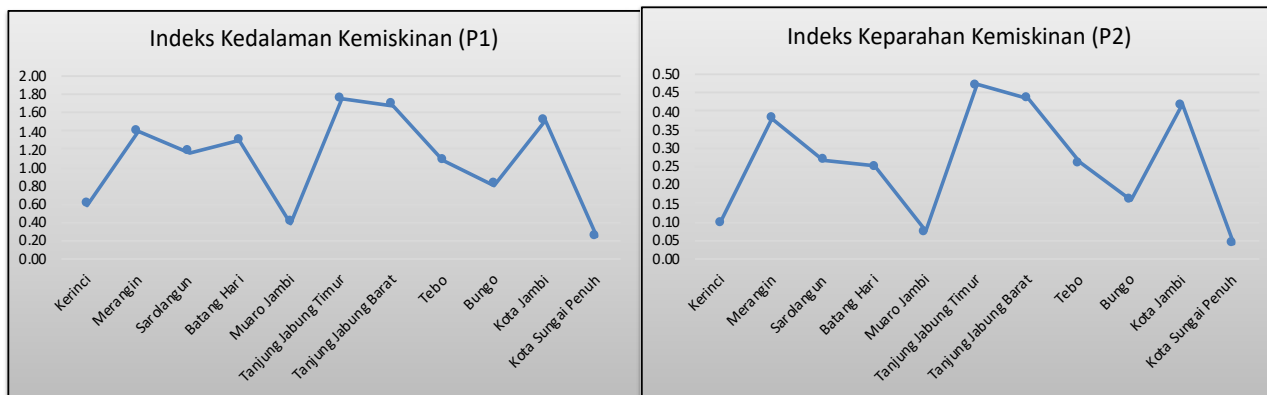
Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun 2019 sebesar :

0,27%

”

Gambar 18

Indek Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain kemiskinan, ketimpangan juga merupakan suatu masalah dalam perekonomian di suatu daerah. Ketimpangan ini dapat diukur dengan indikator Gini ratio. Angka Gini ratio dikeluarkan oleh BPS untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan, BPS menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi menurut World Bank. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distri-

busi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 angka gini ratio kabupaten Sarolangun menunjukkan tren menurun. Tahun 2017 angka ketimpangan kabupaten Sarolangun sebesar 0,36 dan menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 0,29 dan di tahun 2019 tetap berada di angka 0,29.

Gambar 19
Gini Ratio Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

“

Angka Ketimpangan/ Gini Ratio Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Sebesar:

0,29

”

PEMBANGUNAN MANUSIA

Kabupaten Sarolangun



“

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Sarolangun Tahun
2018 Sebesar:**

69,41

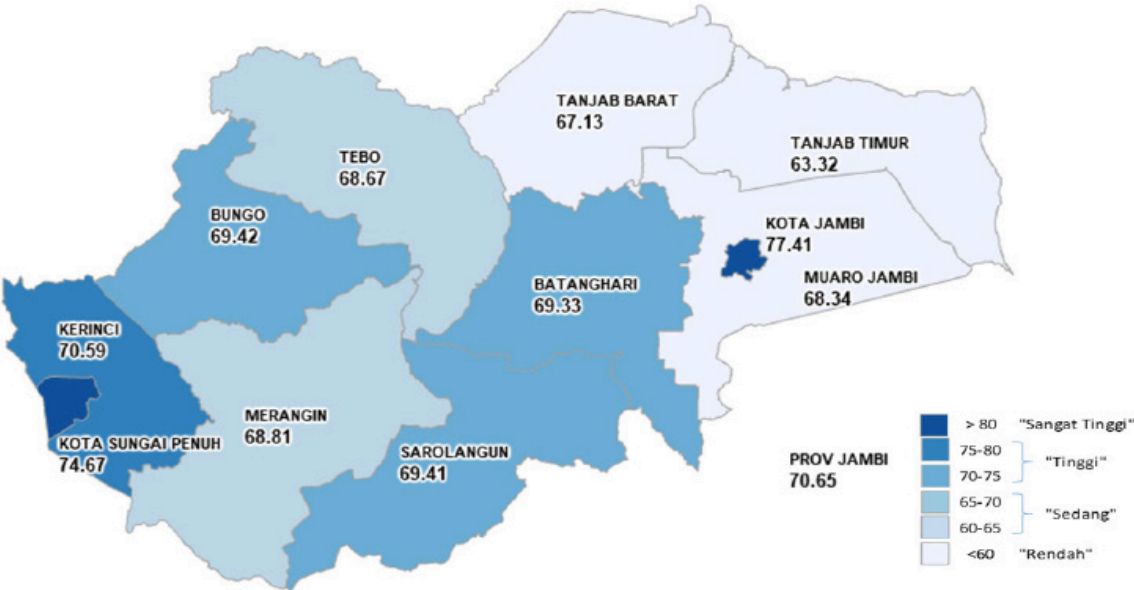
”

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan

direvisi pada tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan

Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Tahun 2018 angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Sarolangun menunjukkan angka sebesar 69,41 dimana yang penggolongannya masuk dalam kategori sedang. Bila dibandingkan dengan kondisi IPM tahun sebelumnya IPM tahun 2018 di kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan.

Gambar 20
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 21
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarolangun Tahun 2018

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Capaian		Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kerinci	69,52	69,65	13,84	13,85	8,19	8,20	9.501	9.951	70,03	70,59	0,80
Merangin	70,94	71,04	11,95	11,97	7,62	7,67	9.753	10.133	68,30	68,81	0,75
Sarolangun	68,83	68,94	12,24	12,25	7,47	7,63	11.478	11.609	69,03	69,41	0,55
Batang Hari	70,12	70,26	12,89	12,90	7,77	7,82	9.573	9.833	68,92	69,33	0,59
Muaro Jambi	70,90	71,02	12,80	12,81	8,08	8,09	8.145	8.456	67,86	68,34	0,71
Tanjung Jabung Timur	65,69	65,86	11,80	11,85	6,33	6,34	8.403	8.904	62,61	63,32	1,13
Tanjung Jabung Barat	67,75	67,87	12,27	12,60	7,44	7,56	9.004	9.395	66,15	67,13	1,48
Tebo	69,67	69,77	12,37	12,38	7,55	7,56	9.832	10.273	68,16	68,67	0,75
Bungo	67,27	67,42	12,59	12,60	8,08	8,09	11.016	11.352	69,04	69,42	0,55
Kota Jambi	72,33	72,43	14,23	14,62	10,66	10,67	11.648	11.912	76,74	77,41	0,87
Kota Sungai Penuh	71,71	71,84	14,76	14,77	9,55	9,84	9.707	10.186	73,75	74,67	1,25
Provinsi Jambi	70,76	70,89	12,87	12,90	8,15	8,23	9.880	10.357	69,99	70,65	0,94
INDONESIA	71,06	71,20	12,85	12,91	8,10	8,17	10.664	11.059	70,81	71,39	0,82

Sumber: Badan Pusat Statistik

“Sarolangun Lebih Sejahtera”



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**